DAFTAR PUSTAKA

Aditya H. D. (2020, 26 Februari). Genjot Raihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bapenda Jabar Sisir ASN di Sejumlah Daerah. GalamediaNews.com. Diperoleh dari https://www.galamedianews.com/bandung-raya/248979/genjot-raihan-pajak-kendaraan bermotor-bapenda-jabar-sisir-asn-di-sejumlah-daerah.html pada tanggal 13 Maret 2020.

Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang : UB Press diperoleh dari books.google.co.id/books?id=48dVDwAAQBAJ&pg=PA126&dq=pajak+kendaraan+bermotor&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjTyrLu9aXoAhWJbisKHTN3CtkQ6AEIPzAD#v=onepage&q=pajak%20kendaraan%20bermotor&f=false diakses pada tanggal 19 Maret 2020.

Antara. (2014). Jabar Resmi Luncurkan e-Samsat Pertama di Indonesia. Beritasatu.com. diperoleh dari https://www.beritasatu.com/nasional/227122-jabar-resmi-luncurkan-esamsat-pertama-di-indonesia di akses pada tanggal 11 Agustus 2020.

Bebey, A. (2019, 9 November). Program Penghapusan Denda Pajak Kendaraan di Jabar Dimulai 10 November. Merdeka.com. Diperoleh dari https://www.merdeka.com/peristiwa/program-penghapusan-denda-pajak-kendaraan-di-jabar-dimulai-10-november.html pada tanggal 12 Maret 2020.

Darmawan, D. (2018). Inovasi Sektor Publik Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraaan Bermotor Kota Makassar. *Diploma thesis, Universitas Negeri Makassar.*

E – Samsat Jabar. (n.d.). diperoleh dari Https://bapenda.jabarprov.go.id/e-samsat-jabar/ diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Edisi7. Semarang : Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, K. I. (2018, 7 Agustus). Bukan Jakarta, Ini Daerah dengan Penyebaran Kendaraan Terbanyak. Detik.com. Diperoleh dari https://oto.detik.com/event/d4153618/bukan-jakarta-ini-daerah-dengan-penyebaran-kendaraan-terbanyak pada tanggal 6 Maret 2020.

Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(1), 20-29. Retrieved from https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/363.

Hartono, J. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman – Pengalaman Edisi 6. Yogyakarta: BPFE.

Https://kbbi.web.id/ diakses pada tanggal 15 April 2020.

Jumlah Kendaraan Bermotor (n.d.). Diperoleh dari https://data.jabarprov.go.id/dataset/jumlah-kendaraan-bermotor/resource/14a7b9ec-de43-4f5d-a84d-e8cccfdc71e4 pada tanggal 9 April 2020.

Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.973/499-Dispenda/2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya, Serta Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: ANDI

Nurulliah, N. (2019, 4 Maret). Sebanyak Tiga Juta Kendaraan Di Jawa Barat Menunggak Pajak. PikiranRakyat.com. Diperoleh dari https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01307351/sebanyak-tiga-juta-kendaraan-di-jawa-barat-menunggak-pajak pada tanggal 6 Maret 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 1.

Putri, A.S. (2019, 16 Desember). Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. Kompas.com. Diperoleh dari https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/110000069/pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar-hukumnya?page=all pada tanggal 12 Maret 2020.

Rahayu, C., & Amirah, M. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes). PERMANA, 10(1).

Reformasi Perpajakan. (n.d.). diperoleh dari Https://pajak.go.id/id/reformasi-perpajakan diakses pada tangreformasigal 20 Maret 2020.

Saragih, A. H. , Hendrawan, A. dan Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali). JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET), 11 (1), 2019, 83-91.

Sari F. M. (2019, 4 April). Jangan Anggap Sepele Denda Telat Bayar Pajak Motor!. Liputan6.com. Diperoleh dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/3932668/jangan-anggap-sepele-denda-telat-bayar-pajak-motor pada tanggal 30 Maret 2020.

Suliyawanti, E. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Mengikuti Tax Amnesty. Thesis, Universitas Islam Indonesia. Diperoleh dari https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7222.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1.

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wardani, D. K. dan Juliansya F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika Vol. 15 No. 2 Tahun 2018.

Wardani, D. K. dan Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi Vol. 5* No. 1 Juni 2017

Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akunida, 5(2), 15-31.